

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kemajuan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan ternyata tidak berdampak signifikan pada perbaikan gizi balita di Indonesia. Gizi buruk atau stunting merupakan kejadian di mana balita mengalami kegagalan untuk tumbuh tinggi dan berkembang layaknya balita pada umumnya seiring dengan bertambahnya usia. Stunting yang terjadi pada balita menyebabkan tingginya angka kematian pada bayi, perkembangan motorik yang rendah, dan fungsi organ tubuh yang kurang optimal (Torlesse et al., 2016).

Dampak dari bahaya stunting dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek antara lain yaitu kerusakan pada fungsi otak, rendahnya tingkat kecerdasan (IQ), dan mudahnya terkena penyakit yang disebabkan karena sistem imun yang lemah. Jangka panjang bagi penderita stunting yaitu tubuh pendek, dan dengan adanya produktifitas yang sangat lambat menyebabkan besarnya biaya hidup dan biaya kesehatan yang berkelanjutan (Sukanti & Faidati, 2021).

Anak penderita stunting akan mempunyai tingkat kepercayaan diri yang rendah, hal tersebut disebabkan selain dari tidak normalnya bentuk tubuh juga disebabkan oleh gangguan psikologis yang mengakibatkan kurang optimalnya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan untuk bisa berfikir secara luas dan kompleks serta penalaran yang bagus untuk memecahkan

masalah di sekitarnya. Berkembangnya kemampuan kognitif pada anak sangat berpengaruh di kehidupan di sekitarnya dengan cepat tanggapnya menguasai ilmu yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan diri untuk bersosialisasi (Umam et al., 2022).

Stunting disebabkan oleh banyak faktor atau multi dimensi yang tidak hanya terpaku dengan gizi buruk pada ibu hamil maupun pada balita (Prasmodiwati, 2019). Beberapa yang disebutkan dari penyebab stunting yaitu proses pengasuhan anak yang kurang baik, minimnya layanan kesehatan di berbagai pelosok desa, kurangnya makanan bergizi, dan kurangnya sumber air bersih serta sanitasi air yang tidak sehat. Selain itu pengetahuan pada keluarga khususnya ibu sangat berpengaruh pada resiko stunting. Pengetahuan tersebut dapat berupa pemilihan makanan maupun perilaku hidup sehat yang sebenarnya harus dilaksanakan dan ditanamkan di keluarga (Boucot & Poinar Jr., 2010). Pemilihan jenis makanan sangat menentukan dengan resiko stunting, di mana makanan yang kurang bergizi bahkan kurang sehat sangat rawan jika harus dikonsumsi bagi balita. Dengan demikian edukasi terkait pengetahuan bagi ibu maupun bakal ibu tentang pengetahuan pemilihan jenis makanan atau hal lain yang bisa menyebabkan resiko terjadinya stunting menjadi pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat (Huriah et al., 2021).

Pencegahan stunting akan menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia demi mengurangi angka kenaikan stunting yang sangat berpengaruh pada kesehatan dan kematian. Dengan menyadari sulitnya mengobati penderita

stunting, maka upaya yang harus dilakukan yaitu mencegah sedini mungkin dengan mengoptimalkan berbagai elemen yang ada, baik dinas kesehatan maupun berbagai lembaga yang mengurus kesehatan dan pertumbuhan anak (Huriah et al., 2021).

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea IV bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian Indonesia merupakan negara yang selalu serius dalam menangani stunting demi mewujudkan generasi yang lebih berkualitas. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tingkat kesehatan dan pendidikan, tingkat kemiskinan, angka ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, dan bagaimana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Mila et al., 2022).

Pada tahun 2017 masalah stunting berada pada angka 22,2% atau jika dikalkulasikan yaitu sebanyak 150,8 juta balita di seluruh dunia. Dari jumlah yang sangat signifikan tersebut, Asia menduduki angka paling banyak dengan penyumbang stunting tertinggi (WHO, 2017). Kolaborasi governance dalam menanggulangi stunting merupakan bentuk upaya yang strategis dengan implementasi secara keseluruhan. Kolaborasi yang berjalan telah memenuhi prinsip dasar dari dinamika *collaborative governance* yaitu keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas bersama. Desain kelembagaan dalam menangani stunting pada penelitian ini menggunakan pola akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban (Saufi, 2021).

Sampai saat ini penanganan dalam mengatasi masalah stunting cukup memadai, yaitu dengan dibuktikannya terdapat berbagai kebijakan pemerintah tentang stunting. Contoh kebijakan tentang penanganan stunting yaitu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, masih banyak lagi yang menandakan keseriusan pemerintah dalam mendukung pencegahan stunting. Kebijakan tersebut menjadi pedoman berbagai wilayah maupun daerah dalam menangani stunting (Perpres, 2020).

Target angka penurunan jumlah stunting atau gizi buruk pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu mencapai 14% di tahun 2024. Dengan demikian bisa diartikan bahwa target di setiap tahunnya harus tercapai penurunan stunting sebesar 2,7%. Angka yang cukup signifikan sebagai peralihan sukses dalam penanganan stunting di Indonesia tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sebagai program pimpinan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia (Mukrimaa *et al.*, 2016).

Di Wonosobo penanganan stunting menjadi salah satu target kinerja pemerintah dalam masa jabatannya. Pasalnya Wonosobo menempati angka prevalensi sebesar 14,4% dari angka 20,22% di tahun 2021. Walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan 5,5% namun angka tersebut masih cukup tinggi. Hal ini juga terjadi Kabupaten Demak, kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Jepara. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Wonosobo yaitu dengan membentuk tim percepatan dengan menggandeng BUMN, BUMD, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan dinas yang terkait serta peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk ikut bersinergi dalam pencegahan stunting. Pravelensi ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka pravelensi di Jawa Tengah dan angka pravelensi di Indonesia. Angka ini tentu menjadi keprihatinan bersama bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menangani lebih serius, mengingat dampak yang begitu bahaya bagi penderita stunting. Jika hal ini tidak mendapat perhatian khusus ditakutkan anak stunting akan menjadi dewasa stunting yang berpotensi melahirkan anak stunting lagi (Mustajab & Indriani, 2023).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menangani stunting meliputi evaluasi, kroscek, verifikasi, dan validasi mengenai angka stunting di Kabupaten Wonosobo. Wonosobo sendiri mempunyai sebanyak 2034 orang TPK Bergerak. Di mana tiap tim terdiri dari tiga orang, yaitu bidan/dinkes, tim PKK, dan kader KB. Kehadiran TPK Bergerak merupakan terobosan baru dalam upaya menangani angka stunting maupun kematian ibu dan anak yang ada di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo (Rahmat *et al.*, 2022).

Program lain termasuk dalam memajukan perekonomian yang diharapkan mampu membantu menangani kasus stunting yaitu dengan

mengadakan pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan yang diikuti 200 warga Wonosobo. Kegiatan merupakan sebuah kerja sama antara Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDI P Dapil VI bersama dengan kementerian kelautan dan perikanan. Pada dasarnya pelatihan ini yaitu bertujuan memberikan pelatihan yang mendidik dan bernilai ekonomis yang bisa dilakukan di berbagai tempat di Wonosobo, mengingat sumber mata air yang melimpah. Dengan demikian diharapkan pelatihan ini mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan, kemiskinan, dan kesehatan yang semua itu termasuk dalam upaya menangani stunting.

Selain kolaborasi antar pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor juga mampu mendukung secara optimal agar penanganan stunting bisa diatasi secara maksimal. Maka dari itu, *collaborative governance* menjadi kunci kesuksesan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting (Sukanti & Faidati, 2021). Collaborative governance memberikan prosedur menangani masalah dengan melibatkan pihak lain, baik organisasi maupun non organisasi dan tidak harus menyelesaikan masalah secara sendiri. Proses pemikiran tersebut lahir setelah ada pergeseran paradigma *government* menjadi *governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hadirnya *collaborative governance* memberikan peluang bagi pemerintah atau sektor publik untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat, swasta, maupun pemangku kepentingan yang bersangkutan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengatasi permasalahan public seperti halnya stunting (Saufi, 2021).

Dalam menjalankan strategi penanganan penurunan dan pencegahan stunting pemerintah Kabupaten Wonosobo membuat regulasi yang termuat dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Wonosobo pasal 7 yaitu membentuk tim koordinasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi/lembaga terkait, dan masyarakat yang di dalamnya meliputi DPPKBPPPA, DINKES, BAPPEDA, Bagian Kesra, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, RSUD, DINSOSPMD, DPU, DISKOMINFO, TP PKK, KEMENAG, Kecamatan dan Desa, Unsiq, dan Danone (Rahmat *et al.*, 2022).

Walaupun sudah berupaya serius dalam menangani kasus stunting, namun pada perjalanannya tetap mendapat kendala yang menyebabkan hasil yang tidak maksimal. Beberapa kendala yang didapat dalam menangani stunting di Kabupaten Wonosobo yaitu kurangnya kolaborasi antar stakeholder yang tergabung dalam penanganan stunting, lalu terbatasnya fasilitas dan SDM, serta susahny memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang pada dasarnya beragam dan memiliki kesadaran yang berbeda-beda. Dan dengan adanya kolaborasi diharapkan mampu memperbaiki kinerja dalam menangani stunting di Wonosobo. Dengan banyaknya kolaborasi dan peran selain pemerintah, maka dalam penelitian ini akan berfokus dengan peran stakeholder yang memiliki andil cukup besar dalam menangani stunting. Sejauh ini stakeholder di Wonosobo yang memiliki peran cukup signifikan dalam menangani stunting yaitu dinas kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, pendidikan, agama, social,

pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana, dan kependudukan catatan sipil.

Dalam penelitian ini menekankan pada kolaborasi pemerintahan dengan institusi yang terkait, tidak berfokus pada angka penurunan jumlah stunting melainkan berfokus pada proses kolaborasi antar institusi. Dengan nantinya diharapkan kualitas kolaborasi yang baik akan berdampak pada angka jumlah stunting. Maka dari itu, dalam persoalan ini akan menitik beratkan sejauh mana kolaborasi dan peran para stakeholder dalam menangani stunting.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana *collaborative governance* para stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui *collaborative governance* para stakeholders dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai acuan dan tolok ukur pencegahan dan penanggulangan stunting bagi pemerintahan.
- b. Sebagai referensi setiap daerah maupun instansi dalam menangani kasus stunting atau gizi buruk.

E. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan referensi peneliti dalam menulis penelitiannya serta agar terhindar dari plagiasi. Dengan adanya penelitian terdahulu mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang diteliti.

No	Peneliti	Judul	Rangkuman
1	(Irfan et al., 2022) https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37990	Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Tumbuh Kembang Anak Di Masa Pandemi (Studi Kasus Balita Kurang Gizi).	Masalah stunting di Jawa Barat masih menjadi fokus yang serius bagi pemerintah. Prevelensi stunting yang berada di Jawa Barat masih pada angka yang cukup tinggi, hal tersebut memiliki banyak kaitan yang menjadi factor penyebab terjadinya stunting. Di antaranya yaitu pola makan, pola asuh, sanitasi, serta air bersih. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yaitu berat

			<p>badan lahir dan ASI eksklusif yang kurang optimal. Dan dengan adanya pandemi memperburuk hal tersebut sehingga peran pemerintah dalam menghadapi masalah stunting harus dilakukan dengan maksimal.</p>
2	<p>(Kusumo et al., 2018)</p> <p>https://docplayer.info/180991280-Keywords-decision-support-system-fuzzy-mamdani-underfive-nutrition.html</p>	<p>Sistem Pendukung keputusan Penanganan Gizi Balita Dengan Metode Fuzzy Mamdani</p>	<p>Pada penelitian ini membahas terakit metode Fuzzy Mamdani yang meneliti tentang stunting dengan didukung adanya aplikasi melalui media browser. Media ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengembangkan kemajuan jaman dengan meningkatkan teknologi yang pada era ini lebih komunikatif dan lebih diterima oleh masyarakat.</p>

			<p>Pada penelitian ini menilai status gizi dan pengukuran fisik pada balita yang dilakukan di saat posyandu dan hasil dari sampel pengukuran tersebut menjadi acuan di dalam metode Fuzzy Mamdani.</p>
3.	<p>(Saputri, 2019)</p> <p>http://jurnal.uni vrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/947</p>	<p>Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>Dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisi upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi stunting. Program-program yang dijalankan meliputi program pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Bangka dan Bangka Barat meliputi, Pemberian Makanan Tambahan (TBM) pada ibu hamil dan balita, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri serta ibu</p>

			<p>hamil, pemberian vitamin A pada balita, peningkatan cakupan imunisasi lengkap pada balita, dan pemberian zine pada kasus diare terutama ibu hamil dan balita. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai saran tempat agar bisa menyeluruh mendapatkannya. Namun demikian, program-program tersebut masih membutuhkan waktu dan pemantauan yang cukup intensif agar membuahkan hasil nyata dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
4.	<p>(Sukanti & Faidati, 2021)</p> <p>https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/</p>	<p>Collaborative Governance</p> <p>Dalam Upaya Penanggulangan</p>	<p>Kolaborasi governance dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Sleman merupakan upaya yang</p>

	index.php/jurnal-caraka-prabu/article/download/418/231/	<p>Stunting di Kabupaten Sleman.</p>	<p>strategis dengan implementasi secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik. Kolaborasi yang berjalan telah memenuhi prinsip dasar dari dinamika <i>collaborative governance</i> yaitu keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas bersama. Desain kelembagaan dalam menangani stunting di Kabupaten Sleman pada penelitian ini menggunakan pola akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban.</p>
5.	<p>(Ulfah et al., 2022)</p> <p>http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPDM</p>	<p>Upaya Penanganan dan Pencegahan Stunting Melalui Program Kuliah Pengabdian</p>	<p>Upaya penanganan dan pencegahan stunting di Desa Damarkasiyan berupa edukasi melalui sosialisasi lewat media berupa poster, namun hal tersebut tidak</p>

	/article/download/24511/11720	Masyarakat Tematik Berbasis Riset UNSIQ 2022 di Desa Damarkasiyan, Kertek, Wonosobo.	mendapat respon baik dari masyarakat, hanya saja terdapat beberapa orang yang ikut serta dan membantu kegiatan ini dengan baik serta mersepon kegiatan tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami stunting menjadi pekerjaan rumah tersendiri, bahkan jika terdapat anak penderita stunting, ibunya tidak terima dan mau mengakui bahwa anaknya menderita stunting. jadi banyak warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut.
6.	(Priyono, 2020) https://stialan.ac.id/jurnal/index.php/gg/article/view/198/133	Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi	Dalam penelitian ini bertujuan menganalisis strategi percepatan penurunan stunting yang berlokasi di perdesaan. Pada

		<p>Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.)</p>	<p>penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dan cara penentuan alternatif program intervensi dan strategi yang aktif digunakan dalam mempercepat penurunan angka stunting yaitu dengan teknik SWOT.</p>
7.	<p>(Christina et al., 2022) https://pkm.bina-mandiri.ac.id/index.php/jpmm/article/view/88</p>	<p>Pola Asuh Orang Tua dan Kurangnya Gizi Anak Penyebab Stunting di Desa Karangduwur, Wonosobo</p>	<p>Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan stunting di Desa Karangduwur masih menemukan banyak kendala terutama pengetahuan masyarakat tentang pentingnya stunting. kejadian stunting disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya</p>

			<p>yaitu faktor pangan, social ekonomi, dan pendidikan harus mendapat prioritas. Ketiga hal tersebut menjadi faktor yang paling krusial dalam menyumbangkan angka stunting di desa Karangduwur.</p>
8.	<p>(Nuranita, 2022) https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30594</p>	<p>Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash. Terdapat 2 tim yaitu tim intervensi spesifik yang dikendalikan oleh Dinas Kesehatan, dan intervensi sensitive yang tidak berhubunagn secara langsung dimana melibatkan sektor lain selain sektor kesehatan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan terdapat ketidakseimbangan sumberdaya baik dari segi maniasi dan keuangan,</p>

			seperti partisipasi masyarakat dalam pembentukan kader stunting yang masih rendah.
9.	(Saufi, 2021) https://conferen ce.trunojoyo.ac.i d/pub/index.php /semnaspk/articl e/download/40/ 47	Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Tengah Pandemi Covid-19	Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dalam menangani kasus stunting di tengah pandemi. Pemerintah bekerja sama dengan para stakeholder yang terkait yaitu pihak swasta, universitas, dan organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode kolaborasi governance yang digunakan oleh Emirson. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam dinamika perjalanan masih

			terdapat kekurangan dalam berkoordinasi, lemahnya kekuatan hukum, dan terdapat kesenjangan antara pemerintah dengan para stakeholder.
10	(Umam et al., 2022) https://pkm.bina-mandiri.ac.id/index.php/jpmm/article/view/83	Sosialisasi Bahaya Stunting di Desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif namun cenderung menggunakan analisis. Di Desa yang diteliti merupakan desa dengan jumlah stunting paling tinggi di Kabupaten Wonosobo. Sosialisasi yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam bentuk kolaborasi yang dijalankan oleh stakeholder dengan terjun langsung dengan masyarakat yang terlibat dan diharapkan

			mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa melakukan hidup sehat sehingga dapat mencegah dan menanggulangi stunting.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 1. 1. Penelitian terdahulu

2. Definisi dan Konsep Collaborative

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash menyatakan bahwa kolaborasi secara umum bisa dibedakan menjadi dua yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normatif. Kolaborasi dalam arti proses adalah serangkaian konsep ikatan yang berisi proses dan tata cara untuk mengatur sejumlah institusi, pemerintah maupun non pemerintah, dilibatkan dalam kerja sama sesuai tupoksi dan porsi sesuai tujuannya masing-masing. Sedangkan pengertian kolaborasi dalam arti

normative yaitu aspirasi maupun tujuan filosofi pemerintah untuk mencapai kerja sama dan interaksi dengan para partner dan mitranya dalam bekerja sama .

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, dapat diartikan bahwa definisi kolaborasi yaitu bentuk kerjasama, kompromi, dan interaksi berbagai elemen maupun lembaga yang terkait baik individu maupun non individu yang memiliki tujuan dengan menerima akibat dan manfaat yang sama. Dalam kerjasama ini mengutamakan nilai dasar yaitu persamaan persepsi, persamaan tujuan, proses, dan tujuan yang sama.

Kolaborasi tidak memiliki batasan periode atau tenggang waktu tertentu. Kolaborasi masih berjalan selama para stakeholder mempunyai ikatan kerjasama, maka kolaborasi masih bisa dijalankan. Hal inilah yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama sebuah tim biasa. Dalam kolaborasi penyusunan konsep kerja dan tujuan memiliki tanggung jawab yang implementasinya bisa dirasakan bersama. Interaksi antar stakeholder mempunyai kolaborasi yang berkala namun berkesinambungan sehingga masih bersifat jangka panjang.

Hakikat tujuan dari kolaborasi yaitu untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama dan saling membantu antara satu sama lain. Sebagaimana telah disampaikan oleh Abdulsyani bahwa kolaborasi merupakan suatu bentuk interaksi social, yang di dalamnya terdapat proses

aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai keberhasilan dengan asas kerja sama agar bisa tercapai tujuan tersebut dengan mudah.

Menurut Emerson, Nabatchi, and Balogh (2011) mendefinisikan *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan actor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, maupun instansi swasta.

Tujuan dari kolaborasi yaitu untuk mempermudah kinerja dalam menyelesaikan masalah sehingga pencapaiannya lebih cepat. Bahkan dalam pembagian tugas dan tupoksinya tidak ada pengkotakan baik setiap stakeholder maupun tugas yang diembannya. Hal ini merupakan bentuk satu kesatuan kerja yang berfokus pada pencapaian tujuan yang terarah.

3. Karakteristik dan Prinsip Dasar *Collaborative*

Dalam menjalankan kolaborasi agar mendapatkan hasil yang maksimal maka harus memperhatikan beberapa komponen di antaranya budaya, kepemimpinan, tim yang terlibat, strategi yang digunakan, dan struktur kelembagaan. Hal ini disampaikan oleh Noorsyamsa Djumara yang menyebutkan terdapat lima komponen utama dalam kolaborasi yaitu:

- a. Collaborative Culture.

Nilai dasar yang menjadi kebiasaan dalam bertingkah laku dan bersikap yang dilakukan secara terus menerus dalam berkolaborasi dan menjadi budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.

b. Collaborative Leadership.

Fungsi situasional yang bukan hanya sekedar hirarki dari setiap posisi dalam sebuah kolaborasi dengan menggunakan kepemimpinan yang ditanamkan pada kolaborator.

c. Strategic Vision.

Prinsip para pemandu dan tujuan keseluruhan yang berdasarkan pada kerjasama intern dan berfokus pada strategi-strategi yang memiliki ciri khas tersendiri.

d. Collaborative Team Process.

Kumpulan dari beberapa proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh beberapa tim kolaborasi dari kerjasama professional yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mencapai keberhasilan dengan mempelajari berbagai keterampilan yang menjadikannya mandiri.

e. Collaborative Structure.

Evaluasi dan pembenahan system yang dijalankan guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif.

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses kegiatan interaksi yang melibatkan beberapa orang atau beberapa organisasi yang menjalin hubungan secara kerja sama dengan mencurahkan segala

pemikiran yang digabungkan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

4. Alasan, Manfaat, dan Tujuan Kolaborasi

Latar belakang yang menjadikan alasan sebuah kolaborasi terbentuk menjadi faktor yang penting dan harus dipahami oleh pihak terkait sebelum terciptanya sebuah kolaborasi. Beberapa alasan yang dapat menciptakan sebuah kolaborasi yaitu:

- a. Seseorang atau kelompok menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan mempunyai kualitas dan pengetahuan untuk menjalin sebuah kolaborasi.
- b. Mempunyai kesadaran yang matang akan pentingnya menjalin sebuah kolaborasi dan dengan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dan berguna dalam berkolaborasi.

Dari dua alasan tersebut dapat dirumuskan bahwa pihak yang melakukan kolaborasi dengan pihak lain akan memperoleh manfaat secara masing-masing. Dan dengan melakukan kolaborasi diharapkan mampu mencapai tujuan secara maksimal dan lebih mudah dengan efektifitas yang tepat sehingga mampu dengan tepat menyelesaikan masalah.

5. Tahapan Dalam Kolaborasi

- a. Tahap I: Problem setting. Merupakan upaya menentukan permasalahan, identifikasi sumber, dan membuat kesepakatan dalam menjalin kolaborasi.
- b. Tahap II: Directing Setting. Merupakan perumusan aturan dengan melakukan pembagian tugas sesuai kelompok, menyatukan kesepakatan dan tujuan sesuai yang diinginkan.
- c. Tahap III: Implementasi. Merupakan pelaksanaan atau eksekusi dalam memecahkan masalah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

6. Governance

Governance menjadi istilah yang berbeda dari mulanya yang terkenal yaitu government. Istilah governance populer dengan maksud untuk menunjukkan pentingnya gelombang reformasi dalam bidang pemerintah.

7. Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah multiparter yang melibatkan para stakeholder secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan kolektif. Kolaborasi hadir untuk menyatukan para pemangku kepentingan umum maupun swasta dalam forum yang kolektif. Kolaborasi berupaya untuk membuat aturan dari dua lembaga atau lebih yang sama-sama

memiliki kepentingan untuk mengatur urusan negara maupun non negara. Tugas tersebut dipercayakan secara penuh kepada lembaga yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi dan tupoksi masing-masing dengan mengutamakan koordinasi.

8. Definisi Pencegahan dan Penanggulangan

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan sebuah langkah pendekatan, prosedur, dan metode yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi interpersonal dan fungsinya sebagai individu ataupun kelompok untuk mencegah atau menghindari terciptanya sesuatu yang tidak diinginkan.

b. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan usaha untuk menyadari dan mewaspadai factor-faktor yang menjadi penyebab sesuatu terjadi. Dengan melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi lalu berupaya agar masalah atau hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi lagi.

9. Definisi Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan anak terlalu pendek pada usianya. Kekurangan gizi pada balita stunting terjadi sejak bayi berada dalam kandungan dan pada masa setelah lahir. Menurut Kementerian Kesehatan penderita stunting didefinisikan dengan nilai z-scorenya kurang

dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*)(Ipan et al., 2021).

Pembangunan kesehatan dari 2015 hingga sekarang berfokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*), pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit yang tidak menular. Target penurunan tersebut menjadi focus dan sasaran yang dimuatkan dalam RPJMN yang pada tahun 2015-2019 sebesar 28%. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, definisi dai pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang mengacu pada Panjang Badan berdasarkan Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang diartikan sebagai padanan kata dari pendek dan sangat pendek (Shiyam et al., 2020).

10. Ciri-ciri Penderita Stunting

Terdapat beberapa ciri-ciri anak yang mengalami stunting atau gizi buruk yang bisa dibedakan dengan anak pada umumnya. Di antaranya yaitu:

- a. Pertumbuhan melambat.
- b. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya.
- c. Pertumbuhan gigi yang lambat.

- d. Kemampuan focus dan memorinya yang relatif buruk.
- e. Pada usia sekitar delapan sampai sepuluh tahun anak menjadi pendiam dan jarang melakukan kontak mata dengan orang yang berada di sekitarnya.
- f. Berat badan balita stunting cenderung menurun dan sulit untuk naik.
- g. Pada anak perempuan yang telah menstruasi, perkembangan tubuh anak akan terhambat.
- h. Anak penderita stunting rawan dengan resiko terkena penyakit karena kekebalan imun tubuh yang buruk.

11. Dampak Stunting

Dampak stunting bagi penderita sangat serius dalam keberlangsungan hidup. Dampak stunting dibedakan menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek penderita stunting yaitu di bidang kesehatan menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbilitas dan dalam bidang perkembangan mengakibatkan penurunan perkembangan kognitif, motoric, bahasa, dan dalam bidang ekonomi yaitu meningkatnya jumlah pengeluaran karena untuk biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjang yaitu memiliki tubuh pendek, gangguan pada mental, kurangnya kepercayaan diri yang mengakibatkan minim pergaulan, dan karena perkembangan yang lambat

masih berlaku secara terus menerus maka biaya hidup untuk kesehatan juga akan meningkat (Sukanti & Faidati, 2021).

12. Faktor-Faktor Penyebab Stunting

Faktor yang menyebabkan terjadinya stunting dapat dikategorikan menjadi empat bagian, di antaranya:

1. Faktor Keluarga dan Rumah Tangga

Factor maternal yang meliputi kurangnya nutrisi pada saat prekonsepsi, kehamilan dan laktasi infeksi, kehamilan pada remaja usia dini, tubuh ibu pendek kesehatan mental, jarak kelahiran yang pendek, dan kelahiran preterm. Selain itu juga terdapat factor lingkungan keluarga stimulasi dan perawatan yang buruk, aktifitas anak yang tidak adekuat, kurangnya suplai air yang adekuat, makanan yang tidak terjaga, serta pengetahuan pengasuh yang rendah.

2. Faktor Makanan Tambahan yang tidak adekuat.

Kualitas makanan yang buruk meliputi rendahnya konsumsi makanan yang beranekaragam, protein hewani yang rendah, kadar energy yang rendah, dan zat mikronutrein yang buruk. Selain dari pemberian makanan yang tidak adekuat juga tingkat keamanan dari makanan yang rendah yang menyebabkan

makanan mudah terkontaminasi penyakit, PHBS yang buruk, serta tempat penyimpanan makanan yang buruk.

3. Faktor Menyusui

Meliputi tidak ASI Eksklusif, penundaan IMD, dan penyapihan anak kurang dari 2 tahun.

4. Faktor Infeksi

Meliputi enteropati di lingkungan, infeksi diare, infeksi pernafasan, malaria, inflamasi, dan kurangnya nafsu makan karena infeksi.

13. Teori Evaluasi Kebijakan.

Evaluasi kebijakan menurut Alkin yaitu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang memiliki kegiatan yang fungsional, yang artinya evaluasi kebijakan tidak hanya tidak dilakukan pada tahap akhir, namun evaluasi kebijakan dilakukan pada seluruh proses kebijakan (Hajaroh, 2019).

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan. Hal tersebut dapat diukur yaitu dengan seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui sebuah tindakan. Yang kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan

tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk yaitu perumusan masalah dan rekomendasi.

14. Teori Implementasi Kebijakan

Teori George C. Edwards III.

Teori implementasi kebijakan menurut Edward III dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Dari keempat variabel tersebut saling keterkaitan dan memiliki hubungan satu sama lain (Edwards, 1980).

1. Struktur Birokrasi

Sebuah implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar jika struktur organisasi berjalan dengan baik. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek struktural yang terpenting dalam sebuah organisasi sesuai dengan prosedur operasi yang (*standard operating procerures* atau SOP). Pedoman bagi implementor dalam bertindak diatur semua dalam SOP.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan syarat keberhasilan sebuah implementasi yang harus dilakukan oleh implementor. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran kebijakan harus sinkron agar bisa mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran dalam implementasi harus tersampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran, jika tujuan dan

sasaran tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka akan menimbulkan terjadinya resistensi dari kelompok lain. Jalinan komunikasi antar stakeholders dalam mencegah dan menanggulangi stunting menjadi penentu keberhasilan, baik komunikasi antar lembaga, swasta, maupun masyarakat.

3. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menjalankan implementasi kebijakan agar efektif. Selain dari komunikasi yang tepat sasaran, sumber daya menjadi komponen dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berwujud manusia yang kompetensi dan menguasai dalam hal finansial.

4. Disposisi

Disposisi dalam hal ini berarti karakteristik dan watak yang dimiliki implementor. Disposisi berjalan sejajar dengan penentuan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Jika implementor memiliki disposisi yang baik sejalan dengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diinginkan. Namun jika implementor tidak mempunyai disposisi yang baik, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Contoh dalam beberapa negara maju yang mempunyai tatanan kenegaraan yang baik maka di dalamnya dihuni oleh implementor yang memiliki disposisi yang disiplin, jujur, dan uet

dalam pekerjaan. Sebuah negara yang memiliki implementor dengan komitmen dan kejujuran rendah maka negara tersebut akan muncu banyak masalah terutama korupsi. Dalam hal ini contoh negara Indonesia, tingkat disposisi implementor yang rendah maka tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi.

F. Definisi Konseptual

1. Collaborative Governance

Collaborative goverance merupakan proses politik yang dilakukan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan yang mencakup berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah dalam mengelola berbagai persoalan tidak bisa mengatasi secara sendiri dan hal demikian mengharuskan pemerintah menjalin hubungan dengan berbagai lembaga dan stakeholder untuk membantu membuat perencanaan dan membantu melaksanakan kolaborasi dalam mengatasi sebuah persoalan (Jumroh, 2021).

Kolaborasi menjadi sebuah keseimbangan antara pihak dan sumberdaya yang memiliki kepentingan dan melakukan intervensi kepada pihak lain sehingga muncul sifat ketergantungan dalam menangani sebuah masalah sesuai keputusan yang kolektif. Tahapan dialog dalam menjalin kolaborasi harus terarah yang efektif dan lebih substantif. Segala bentuk kebijakan dan regulasi dalam menangani stunting yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo juga menjadi fokus pada

penelitian ini. Untuk mengukur sebuah keberhasilan collaborative governance dalam penelitian ini dapat diukur melalui indikator-indikator dari Edward DeSeve. Di antaranya yaitu, (1) Network structure, (2) Commitment to a common purpose, (3) Trust among the participants, (4) Governance, (5) Access to authority, (6) Responsibility, (7) Information sharing, (8) Access to resources (Silayar et al., 2021).

2. Stunting

Stunting merupakan masalah yang menjadi fokus kinerja pemerintah bukan hanya di Indonesia namun di setiap negara seluruh dunia. Stunting merupakan masalah kesehatan yang disebabkan karena kekurangan gizi dan ketidakcukupan nutrisi yang menyebabkan lemahnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Penderita stunting akan mengalami masalah tidak hanya pada kesehatan namun dalam mental dan kepercayaan diri yang lemah. Penderita stunting cenderung tidak bisa bergaul karena kurangnya proses beradaptasi dengan lingkungan.

Untuk mengukur angka stunting menggunakan beberapa indikator, yaitu pertama kesehatan penderita stunting dengan parameter kondisi kesehatan pada penderita stunting. Kedua, berat badan dan tinggi badan bayi ketika lahir dengan parameter berat badan dan tinggi badan bayi pada saat dilahirkan yang diukur sesuai dengan catatan pada buku KIA. Ketiga, pemberian ASI Eksklusif dengan parameter pemberian ASI pada bayi sejak

lahir hingga enam bulan tanpa memberi makanan/minuman tambahan kecuali obat (Perdossi & Cristofel, 2020)

G. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Kolaborasi Governance	Struktur jaringan	Penguatan yang dilakukan antar lembaga/stakeholder dalam berkolaborasi menanggulangi stunting.
	Tingkat kepercayaan antar stakeholder	Kepercayaan stakeholder dalam berkolaborasi dalam menangani stunting baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
	Tata Kelola Pemerintahan	Akses data yang mudah bagi para stakeholders, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Wonosobo.
	Akses data	Akses data yang mudah untuk pemerintah, swasta, dan lembaga

	swadaya masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting.
Fasilitas	Fasilitas yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam menangani stunting
Stakeholders yang terlibat.	Tokoh atau lembaga yang terlibat serta perannya dalam mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Wonosobo. Baik Pemerintahan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Instansi Vertikal, dan Masyarakat yang menangani stunting.
Inovasi Program	Program yang dijalankan oleh dinas yang terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Implementasi kebijakan	Pelaksanaan kebijakan dengan mempertimbangkan faktor struktur birokrasi, faktor

	collaborative governance	komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor disposisi yang harus dimiliki para stakeholder dalam menangani stunting.
Stunting	Kesehatan penderita stunting	Kondisi kesehatan pada penderita stunting yang mudah terserang penyakit.
	Berat badan dan tinggi badan lahir	Berat badan dan tinggi badan bayi pada saat dilahirkan yang diukur sesuai dengan catatan pada buku KIA.
	Pemberian ASI Eksklusif	Pemberian ASI pada bayi sejak lahir hingga enam bulan tanpa memberi makanan/minuman tambahan kecuali obat.

Table 1. 2. Definisi Operasional

H. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong yaitu penelitian yang berfokus untuk memahami fenomena tentang bagaimana kejadian yang dialami oleh subjek

penelitian misalkan persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain hal yang secara holistik dengan pendeskripsian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, di dalam suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode yang valid dan alamiah (Moleong & Surjaman, 1989). Segala bentuk implementasi kebijakan dalam menangani stunting dapat diukur keberhasilannya menggunakan indikator yang dikemukakan di atas.

Desain kelembagaan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan dalam penguatan penanggulangan stunting yang berada di Kabupaten Wonosobo. Model yang digambarkan menjadi pola pertanggungjawaban dalam kolaborasi antar *stakeholders* yang terlibat. Pola pertanggungjawaban tidak hanya berfokus pada administratif, namun juga pada stakeholder yang terlibat akan terbangun jejaring yang kuat satu sama lain dalam dinamika *collaborative governance* (Saufi, 2021). Adapun desain penelitiannya yaitu:



Gambar 1. 1. Desain Penelitian

Dari gambar pola desain di atas, menyatakan bahwa proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada kolaborasi pemerintah di Kabupaten Wonosobo. Pola penelitian ini berfokus pada konsep yang berjalan dalam mencegah dan menanggulangi stunting, yaitu pada siapa stakeholders yang terlibat, bagaimana proses collaborative governance, pelaksanaan implementasi kebijakan dengan menilik pada program, dan hasil atau impact angka penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo dari upaya pemerintah yang sudah dijalankan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo yang meneliti kolaborasi para stakeholder dalam menangani stunting meliputi Pemerintahan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Instansi Vertikal, dan Masyarakat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, objek yang digunakan dalam penelitian yaitu tempat yang menjadi sasaran perolehan data dan berbagai keterangan. Tempat dalam penelitian ini yaitu berada di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu informan yang akan memberikan

keterangan dan memberikan data terkait stunting dan dinamika kolaborasi pemerintah dalam menangani stunting, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat.

4. Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang langsung diperoleh dan dikumpulkan dari objek penelitian, karena dianggap mereka mengetahui dan mampu memberikan informasi secara mendalam terkait data yang sedang diteliti. Pengumpulan data digali dengan cara wawancara yang dilakukan langsung kepada informan dengan direkam dengan tape recorder serta dengan menggunakan kuisioner yang telah peneliti susun. Dalam penggalan informasi ini bertujuan mampu mendapatkan informasi yang nyata, memberikan data valid sesuai dengan yang diteliti, dan mampu memberikan pendapat atau tanggapan terhadap masalah yang sedang diteliti. Beberapa informan yang bersangkutan dalam penggalan data primer tersebut yaitu:

- a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (dr. Mohamad Riyatno, M.Kes)
- b. BAPPEDA (Agus Dwiatmojo, ST., MT)
- c. DINSOSPMD (Eka Wati Istiana, S.Psi)
- d. Dinas PPKBPPA (Dewi Yuliana Satriani, SST, MKes)
- e. DPU (Umilatul Azizah, S.ST)

f. GENRE (Ayu Setyaningsih)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek yang sedang diteliti. Data sekunder diperoleh di antaranya dari berbagai pihak, meliputi buku, jurnal, artikel, dokumentasi berupa transkrip wawancara, teori tentang variabel yang sedang diteliti, dan media sosial yang berkaitan dengan strategi atau informasi tentang penanggulangan stunting.

5. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap pengelompokan dan pengklasifikasian data dengan sistematis yang sudah ditentukan. Pada dasarnya dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh. Data primer diperoleh dari bentuk wawancara maupun observasi yang diperoleh langsung dari informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung yang digunakan menjadi data pendukung dari data primer. Data tersebut bisa didapat dari web, jurnal, maupun media yang ada sehingga bisa digunakan menjadi referensi pendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian secara langsung terhadap objek sebuah tempat yang akan diteliti oleh peneliti agar mendapat informasi yang akurat. Pada penelitian ini observasi yang dititikberatkan yaitu pada kolaborasi governance antar stakeholder dalam menangani stunting di Kabupaten Wonosobo bukan berfokus pada penurunan angka pravelensi stunting. Dalam observasi ini memiliki sifat utana yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mendapatkan informasi yang telah silam.

b. Wawancara

Definisi pengumpulan data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Istilah lain yaitu wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang bisa memberikan informasi terkait hal yang sedang diteliti.

Menurut Nasution bahwa wawancara pada dasarnya dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk wawancara berstruktur maupun wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan kemauan pewawancara sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sedangkan wawancara tak berstruktur yaitu timbul dari jawaban yang berkembang di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur namun masih dalam konteks pembahasan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur, yaitu dengan menyediakan kuesioner dengan berbagai pertanyaan yang sudah ditentukan disiapkan yang kemudian ditanyakan kepada informan yang sudah ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pendukung dan pelengkap dengan menggunakan metode observasi wawancara sehingga lebih efektif dan akurat atau memiliki tanggung jawab tinggi dengan didukung oleh foto atau karya tulis. Sejumlah data besar dan fakta tersimpan dalam bentuk dokumentasi yang terliput dalam bentuk foto, catatan harian, dan laporan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu proses pengolahan data menjadi informasi baru yang lebih jelas dan mudah dipahami. Proses ini bertujuan agar data yang dihasilkan mudah dipahami dan menjadi solusi bagi suatu permasalahan yang tentunya berhubungan dengan kolaborasi governance dalam penanggulangan stunting. Dalam menganalisis data terdapat beberapa metode sesuai dengan industri dan tujuan analisis. Ada tiga tahapan dalam menganalisa data deskriptif kualitatif. Di antaranya yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses eliminasi data yang semula banyak masuk informasi yang kurang mudah untuk dipahami dan di tahap ini data tersebut akan dikurangi sesuai dengan data yang dibutuhkan. Reduksi data merupakan tahap dalam teknis analisa data kualitatif yang bertujuan untuk memudahkan data lebih bermakna dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tampilan yang mengungkapkan buah karya dari peneliti berupa data penelitian yang disajikan dalam berbagai bentuk media. Penyajian data telah disusun rapi dan sistematis agar memudahkan penelitian untuk dipahami dan memudahkan menarik kesimpulan juga. Bentuk penyajian data kualitatif ini bisa berupa teks naratif, bagan, grafik, matriks,

maupun catatan yang menjelaskan hasil penelitian yang sesuai di lapangan.

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan tahap yang bertujuan untuk mencari makna dari data penelitian yang berdasarkan hubungan, persamaan, dan perbedaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut berupaya untuk menjawab persoalan yang ada namun hanya bersifat sementara. Kesimpulan sementara lalu akan diuji dengan berbagai bukti yang akan menentukan kesimpulan tersebut apakah valid atau tidak. Jika kesimpulan pada tahap ini didukung dengan adanya bukti yang akurat maka kesimpulan ini bersifat valid dan kredibel.